

**PANDANGAN
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

Dibacakan oleh : Ahmad Yohan, M.Si
Nomor Anggota : 512
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Timur I

Fraksi Partai Amanat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811



**PANDANGAN
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

Dibacakan oleh : Ahmad Yohan, M.Si
Nomor Anggota : A-512
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Timur I

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

**Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Keuangan RI Yang Kami Hormati
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI Yang Kami Hormati
Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Yang Kami Hormati
Saudara Gubernur Bank Indonesia Yang Kami Hormati
Dan hadirin yang berbahagia**

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, kita diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini, dalam rangka penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini, Fraksi PAN juga mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-77. Semoga Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam menyongsong masa depan kehidupan bangsa yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Kita

berdo'a semoga bangsa Indonesia dapat melewati masa-masa sulit dan segera terbebas dari pandemi Covid-19. *Aamiin.*

Hadirin yang Berbahagia,

Kondisi ekonomi global saat ini masih sangat mengkhawatirkan bahkan cenderung mengarah pada situasi resesi dunia. Isu global yang sangat mengemuka adalah ancaman krisis pangan dunia disebabkan aksi proteksionisme pangan bermunculan di berbagai negara yang mengakibatkan rantai pasokan perdagangan dunia makin kompleks sehingga mengakibatkan tingginya inflasi harga komoditas global. Selain itu, tensi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda ditambah lagi dengan eskalasi konflik antara China dengan Taiwan. Demikian pula ketidakpastian pasar keuangan global yang mengakibatkan terbatasnya aliran modal ke berbagai negara di dunia. Hal ini berpotensi memberikan tekanan ekonomi bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari berbagai tantangan dan kondisi global tersebut, telah mendorong terjadinya stagflasi dimana Inflasi dunia terus meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi global diprediksi terus menyusut.

Bertitik tolak dari situasi tersebut, Fraksi PAN mengapresiasi optimisme pemerintah dalam mendesain APBN TA 2023 yang bersifat waspada, antisipatif, dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak. Fraksi PAN menaruh harapan besar agar RAPBN TA 2023 ini dapat menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional serta keluar dari berbagai krisis multidimensi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Yang Kami Hormati

Setelah memperhatikan pidato nota keuangan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo secara seksama tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, maka Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Fraksi PAN menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah sebesar 5,3 persen masih cukup realistis. Berkaca dari pencapaian tahun berjalan saat ini,

Bappenas
BKF
DJA:

pertumbuhan ekonomi di kuartal I sebesar 5,01 persen dan di kuartal II sebesar 5,44 persen. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam pemulihan pasca pandemi Covid 19. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur yang menopang kinerja ekspor, keran sektor pariwisata yang telah dibuka kembali pasca pandemi, sektor akomodasi dan transportasi yang kini sudah mulai bangkit, dan neraca perdagangan yang mengalami surplus turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, Fraksi PAN mengapresiasi atas penghargaan yang diterima pemerintah dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021, yang dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia melakukan ekspor beras sebanyak dua juta ton pada tahun 2022. Keberhasilan Indonesia sekaligus langkah besar untuk menciptakan ketahanan pangan nasional yang mana beras memegang peranan besar dalam rantai pasokan pangan nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang rentan terhadap ancaman krisis pangan.

Fraksi PAN mendorong agar belanja pemerintah bisa lebih dioptimalkan dan penyerapan anggaran bisa dipercepat sehingga tingkat konsumsi masyarakat dapat meningkat sedini mungkin. Apalagi diketahui bahwa belanja pemerintah merupakan factor utama yang bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini. Fraksi PAN juga tegaskan kembali agar seluruh bantuan sosial yang diberikan sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Bantuan sosial ini diharapkan dapat menjadi stimulus lanjutan pasca program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan dari tahun 2020-2022 sebagai jalan keluar untuk mengantisipasi gejolak ekonomi akibat selesainya program PEN.

- **Penerimaan Perpajakan**

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2023 tumbuh sebesar Rp2.016,9 triliun. Menurut Fraksi PAN target tersebut masih realistis. Angka tersebut jauh meningkat dari APBN tahun 2022 sebesar Rp 1.510,0 triliun. Keberadaan pajak sangat vital bagi penerimaan negara. Di tahun 2023 diharapkan ekonomi nasional sudah pulih dan bangkit di berbagai sektor. Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk memperkuat

Kemantan
Kemendag
DJA:
Dit. Ekontim

Kemensos
DJA:
Dit. Ekontim
Dit. PMK
Dit. PHK BA BUN

Kemenkominfo
BKF
DJP
DJA:

implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta mengoptimalkan kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dilakukan oleh Kominfo sebagai langkah untuk menggali potensi pajak di sektor industri digital.

Fraksi PAN juga mendorong pemerintah untuk terus menjaga dan meningkatkan penerimaan sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara disamping sumber-sumber penerimaan lainnya, serta mendorong untuk mempermudah pendaftaran UMKM menjadi entitas bisnis formal. Di samping itu, Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk mendiversifikasi objek cukai selain minuman beralkohol dan tembakau. Hal ini dapat berguna untuk mengoptimalkan pendapatan negara karena saat ini kontribusi cukai di Indonesia terhadap PDB masih rendah. Fraksi PAN meyakini jika pemerintah mampu meningkatkan penerimaan negara, hal tersebut akan berbanding lurus dengan rating instrumen fiskal dan kemampuan menutup defisit dan utang negara. Pada akhirnya hal tersebut akan mendorong negara dan bangsa ini semakin maju, karena realisasi pendapatan dan keuangan negara yang baik dan sehat.

- **Lifting Minyak dan Gas**

Pemerintah menetapkan target lifting minyak pada tahun 2023 sebesar 660 ribu barel per hari, lebih rendah dari target 2022 sebesar 703 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari. Fraksi PAN menilai target produksi minyak bumi dan gas pada tahun 2023 realistis. Fraksi PAN bisa memahami target lifting Migas yang ditetapkan pemerintah mengingat telah terjadi penurunan produksi hulu migas, terutama disebabkan oleh sumur dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Kendati demikian, Fraksi PAN juga meminta agar pemerintah memperhatikan keseimbangan *supply* dan *demand* Migas. Disamping itu mendorong pemerintah untuk menggunakan teknologi tambahan agar lifting minyak dan gas bisa lebih optimal dan mampu mencapai target satu juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030.

- **Inflasi**

Fraksi PAN menilai inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 3,3 persen cukup optimis, mengingat laju inflasi tahun berjalan per Juli 2022 sebesar 4,94 persen. Fraksi PAN menilai bahwa penetapan laju inflasi ini menunjukkan bahwa pemerintah harus

BKF
DJP
DJBC
DJA:
Dit. Ekontim

Kemen ESDM
BKF
DJA:
PNBP SDA

Bank Indonesia
Kemen ESDM
BKF
DJA:
Dit. PNBP SDA

bekerja keras memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri dengan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. Menurut Fraksi PAN, angka inflasi sebesar 3,3 persen yang dipatok oleh pemerintah dapat berhasil jika pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan pangan ditengah derasnya impor bahan pangan untuk kebutuhan dalam negeri dan kondisi ekonomi eksternal yang tidak menentu. Untuk itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk menjaga laju inflasi dengan cara menjaga pasokan barang dan jasa khususnya yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok di masyarakat serta sedapat mungkin mengurangi import kebutuhan pokok. Di samping itu, pemerintah perlu berhati-hati terhadap rencana kebijakan belanja subsidi energi pada tahun mendatang mengingat melonjaknya kebutuhan pangan dan energi. Kekhawatiran publik bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM, LPG bersubsidi dan tarif listrik perlu mendapat perhatian serius karena akan berdampak pada melonjaknya inflasi dan melemahnya daya beli masyarakat. Dalam menghadapi dilema subsidi energi, pemerintah sudah seharusnya mendesain kebijakan subsidi energi tepat sasaran. Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah melalui berbagai program perlindungan social.

Kemenpan RB

DJA:

Dit. PMK

- **Reformasi Birokrasi**

Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Fraksi PAN meyakini Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai *good governance* dan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap aspek kelembagaan, tatalaksana, pengelolaan dan sumber daya aparatur pemerintah. Reformasi birokrasi menurut Fraksi PAN menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya pembenahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Kemen ESDM

Kemen BUMN

BKF

DJA:

Dit. PNBP SDA

Dit. PNBP KL

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp426,3 triliun. Fraksi PAN meminta agar penetapan target ini harus didukung dengan berbagai kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan PNBP seperti PNBP SDA, dividen BUMN, PNBP pada Kementerian/Lembaga, dan PNBP pada BLU.

Fraksi PAN berpandangan pendapatan SDA dipengaruhi oleh prospek harga komoditas Migas dan Minerba yang tidak setinggi tahun 2022, walaupun lifting migas diharapkan membaik. Karena itu, Fraksi PAN menilai perlu adanya optimalisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN. PNBK Kementerian/Lembaga harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas layanan, pengelolaan aset BMN dan peningkatan sinergi antar instansi terkait. Di samping itu, Fraksi PAN mendorong dilakukannya katalisasi dan harmonisasi jenis maupun besaran tarif antar Kementerian/Lembaga, termasuk daerah. Untuk itu, penguatan peran pengawasan melalui sinergi pengawasan/pemeriksaan PNBK, serta perbaikan tata kelola PNBK melalui penyempurnaan regulasi di bidang PNBK (termasuk tarif) harus segera dilakukan.

Kemendikbud •
Kemenkes
Kemen PUPR
Kemenkominfo
Kemenhub
Kemenpan RB
DJA:
Dit. Ekontim
Dit. PMK
Dit. PHK BA BUN

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.230,0251 triliun. Fraksi PAN mendorong agar Pemerintah fokus melakukan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, Fraksi PAN mendorong Pemerintah melakukan penguatan langkah-langkah antara lain: melakukan penguatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi; melaksanakan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi; serta mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Selanjutnya Fraksi PAN meminta Pemerintah harus tetap mengoptimalkan belanja modal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat, sebab realisasi belanja modal dari tahun ke tahun memperlihatkan serapan yang minim. Menurut laporan Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara untuk belanja pegawai sebesar 46,39 persen, belanja barang sebesar 31,68 persen, belanja modal sebesar 20,90 persen, belanja transfer sebesar 51,27 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 41,44 persen Per 20 Juni tahun ini. Untuk itu Fraksi PAN mengharapkan pemerintah untuk terus melakukan peningkatan realisasi dan efisiensi belanja non prioritas, dan mendorong belanja berkualitas, agar output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Fraksi PAN juga meminta agar pemerintah dapat memperbaiki manajemen arus kas (*cash flow*) dalam pengelolaan pembiayaan utang.

DJA:
Dit. Ekontim
Dit. PMK
Dit. PHK BA BUN

DJPPR
DJA:

Mengingat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Semester I 2022 masih mencatatkan angka yang tinggi yaitu Rp227,1 triliun. Padahal besarnya SiLPA tersebut menggambarkan APBN yang semakin tidak efisien karena harus menanggung beban bunga (*cost of fund*) yang cukup tinggi. Karenanya, Fraksi PAN merekomendasikan agar pemerintah dapat mengantisipasi terjadinya kelebihan pembiayaan (*overfinancing*) serta menargetkan berapa batas maksimum atas SiLPA tersebut. Fraksi PAN berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan belanja modal di pemerintah pusat yang notabene sangat penting sekali untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi saat ini.

- **Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Kemendagri
Kemen PDDT
DJP
DJA:
Dit. PMK

Transfer ke daerah dan dana desa tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp811,7 triliun, atau naik dari sebelumnya sebesar Rp769,6 triliun pada APBN TA 2022. Fraksi PAN meminta agar pemerintah pusat dapat mengoptimalkan dan mengarahkan pemanfaatan belanja transfer ke daerah dan dana desa untuk pemulihan kesehatan, perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat. Fraksi PAN juga mendorong agar dana desa dapat difokuskan untuk beberapa program prioritas, yang menitikberatkan pada sektor perekonomian, seperti padat karya tunai, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, transformasi ekonomi desa melalui desa digital, dan peningkatan peran BUMDesa, serta mengurangi porsi untuk program pembangunan infrastruktur desa. Di samping itu, Fraksi PAN menilai selama ini dana transfer ke daerah belum optimal / belum mampu memberikan efek ekonomi yang signifikan. Hal ini dikarenakan minimnya tingkat serapan pemerintah daerah terhadap APBD. Sementara itu optimalisasi serapan APBD oleh Pemerintah daerah juga merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk memberikan asistensi kepada pemerintah daerah agar mampu melakukan serapan anggaran secara optimal.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Keuangan RI Yang Kami Hormati

Saudara Menteri Hukum dan HAM RI Yang Kami Hormati

Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Yang Kami Hormati

Saudara Gubernur Bank Indonesia Yang Kami Hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PAN **menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas lebih lanjut ke tahap berikutnya.

Billahitaufiq wal hidayah,

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 23 Agustus 2022

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. H. Saleh Partaonnan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.

Ketua

Eko Hendro Purnomo, S.Sos

Sekretaris